



**PERATURAN DESA MURNISARI
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER
DARI ASET DESA DAN PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA MURNISARI
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR**

PERATURAN DESA MURNISARI

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI ASET DESA
DAN PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MURNISARI

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa, sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURNISARI

Dan

KEPALA DESA MURNISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MURNISARI TENTANG PENDAPATAN ASLI
DESA YANG BERSUMBER DARI ASET DESA DAN PUNGUTAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Murnisari, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
7. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II

PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB III
JENIS, BENTUK DAN BESARNYA PENDAPATAN ASLI DESA
Pasal 3

Jenis-Jenis sumber Pendapatan Asli Desa :

- a. Tanah Darat Kas Desa
- b. Tanah Sawah Desa
- c. Terminal Desa
- d. WC Umum Milik Desa
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- f. Perusahaan Swasta
- g. Perusahaan Galian Kategori C. (Galian C)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana lampiran I.

Pasal 4

Bentuk Pendapatan Asli Desa adalah berupa uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan penggalian Pendapatan Asli Desa.
- 2) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB V
PENGESAHAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 6

- 1) Ketentuan besarnya Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bab III tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
- 2) Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan BPD atau persetujuan dari Bupati Cianjur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- 1) Pendapatan Asli Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VI

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 8

- 1) Perencanaan, penggunaan dan pengurusan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Bab III ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Semua Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Bab V dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Penerimaan dari Pendapatan Asli Desa, kepala Desa :

- 1) Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 10

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil Pendapatan Asli Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

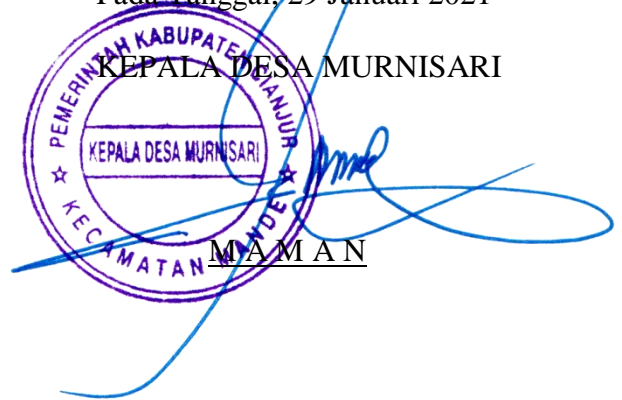
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Murnisari.

Ditetapkan di Desa Murnisari
Pada Tanggal, 29 Januari 2021

KEPALA DESA MURNISARI



Di undangan di Desa Murnisari
Pada Tanggal, 29 Januari 2021
SEKRETARIS DESA

ANDRI SOLEHUDIN




LEMBARAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2021

Lampiran Peraturan Desa Murnisari
 Nomor : 03 Tahun 2021
 Tanggal : 29 Januari 201

DAFTAR PENDAPATAN ASLI DESA

NO	JENIS PENDAPATAN	BESARNYA	KETERANGAN
A	Pendapatan dari Tanah Kas Desa		
1	a. Kategori I b. Kategori II c. Kategori III	Rp. Rp. Rp.	Pertahun
	Jumlah	Rp.	
2	Sawah Desa	Rp. 5.800.000,-	Pertahun
3	Pasar Desa	Rp.	Pertahun
B	Tempat Pemandian Umum		
1	WC Umum Milik Desa	Rp.	
C	Pendapatan dari Pungutan Desa		
1	BUMN/BUMD	Rp.	
2	Perusahaan Swasta	Rp.	
3	Perusahaan Galian Kategori C (Galian C)	Rp.	
D	Lain-Lain Kekayaan Milik Desa.		
	a.	Rp. 0.00,-	
E	Pungutan Swadaya Masyarakat :		
	a.	Rp. 0.00,-	
F	Pungutan-Pungutan Yang Berupa Barang :		
	a.	Rp. 0.00,-	
G	Pungutan/Sumbangan Pihak Ketiga :		
	a.	Rp. 0.00,-	



 KEPALA DESA MURNISARI